

**EFEKTIVITAS REFOCUSING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENANGANAN PANDEMI
COVID-19 KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA TAHUN
ANGGARAN 2021**

Petrich Eduardo Katutung
NPP 29.1809

*Asdaf Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua
Program Studi Keuangan Publik*

**peka1814@gmail.com
082285021290**

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): *In practice, there are several obstacles in refocusing the APBD, including regional head policies that are always changing and public awareness of Covid-19 is still lacking. **Purpose:** This study aims to determine the effectiveness of refocusing the 2021 APBD in accelerating the handling of COVID-19, knowing the supporting and inhibiting factors faced in the process of refocusing the 2021 Regional Revenue and Expenditure Budget, as well as the efforts made by BPKAD to overcome obstacles in refocusing the Regional Revenue and Expenditure Budget in 2021. **Method:** The method used in this observation is descriptive qualitative research with an inductive approach. Techniques Data analysis was performed using triangulation. **Results/Findings:** The results show that the refocusing of the 2021 Regional Revenue and Expenditure Budget by the Regional Financial and Asset Management Agency of Biak Numfor Regency has been carried out. Factors supporting the refocusing of the 2021 Regional Revenue and Expenditure Budget include the budget of each Regional Apparatus Organization which is reduced by 20% each from the Regional Apparatus Organization's budget and the performance of employees who start implementing work form home as well as the support from each Regional Apparatus Organization to handle spread of COVID-19. The factors that hinder the refocusing of the 2021 Regional Revenue and Expenditure Budget are the budget used to buy consumables by health workers as well as for treating patients, which requires a very large budget compared to the existing budget and the General Allocation Fund received by the regional government from the province is also lacking. **Conclusion:** BPKAD should be consistent and maintain the budget that has been shared regarding the policies of the regional head or continue to maintain the budget in several sectors that are deemed necessary to be maintained.*

Keywords: *Budget Refocusing, Regional Revenue and Expenditure Budget*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam prakteknya, refocusing APBD terdapat beberapa kendala diantaranya kebijakan kepala daerah yang selalu berubah-ubah dan juga kesadaran masyarakat akan Covid-19 yang masih kurang. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas refocusing APBD tahun 2021 dalam percepatan penanganan COVID-19, mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam proses

refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2021, serta Upaya yang dilakukan BPKAD mengatasi hambatan dalam merefocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2021. **Metode** : Metode yang digunakan dalam pengamatan ini adalah Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Induktif. Teknik Analisis data dilakukan dengan menggunakan Triangulasi. **Hasil/Temuan** : Hasil Penelitian menunjukkan bahwa refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2021 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor telah dilaksanakan. Faktor pendukung refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2021 antara lain anggaran tiap Organisasi Perangkat Daerah yang dikurangi masing masing sebesar 20% dari anggaran Organisasi Perangkat Daerah dan kinerja para pegawai yang mulai menerapkan work form home serta adanya dukungan dari tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menangani penyebaran COVID-19. Adapun faktor yang menghambat dalam refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2021 adalah anggaran yang digunakan untuk membeli barang habis pakai oleh tenaga kesehatan juga untuk penanganan pasien membutuhkan anggaran yang masih dihitung sangat besar ketimbang anggaran ada dan Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah dari Provinsi juga kurang.. **Kesimpulan** : BPKAD sebaiknya konsisten dan mempertahankan anggaran yang telah dibagi mengenai kebijakan kepala daerah atau terus mempertahankan anggaran di beberapa sektor yang dirasa perlu dipertahankan.

Kata Kunci : Refocusing Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya mempunyai tujuan utama yaitu mewujudkan Kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Hal tersebut merupakan acuan dimana dalam penyelenggaraan pemerintahannya Pemerintah Indonesia berpedoman pada Pancasila serta Undang – Undang Dasar 1945.

Suatu negara dikategorikan memiliki rakyat yang sejahtera ditandai dengan indikator seperti adanya keadilan yang diperoleh oleh semua lapisan masyarakat, rakyat yang cerdas, kemakmuran dan juga kesejahteraan yang terpenuhi bagi masyarakatnya. Hal - hal tersebut tentunya tidak terlepas dalam perwujudan proses penganggaran yang dilaksanakan pada setiap instansi maupun unit di pemerintahan yang berada di pusat maupun daerah serta penganggaran program kegiatan yang diselenggarakan di kecamatan dan kelurahan yang sudah dirancang dan diatur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Kabupaten Biak Numfor menetapkan APBD Tahun Anggaran 2021 yang mempunyai rincian seperti belanja daerah sekitar Rp.1,28 triliun serta anggaran pendapatan sekitar Rp.1,26 triliun. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sendiri juga terus berupaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan sehingga lebih transparan, akuntabel, efektif serta efisien dalam pemberian informasi. Untuk setiap proyek yang tercantum di dalam APBD sendiri harus dapat dipastikan sumber anggarannya sehingga tidak menyebabkan timbulnya utang di masa mendatang. Searah dengan visi dan misi Kabupaten Biak Numfor, Bupati Biak Numfor menyampaikan bahwa prioritas program Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 yakni di bidang kesehatan, pendidikan dan perikanan.

Pada akhir tahun 2019 muncul sebuah kasus yang disebabkan oleh sebuah virus yang memiliki kemiripan dengan SARS di Wuhan China. Hal tersebut diungkapkan dokter bernama Li Wenliang yang menyebarkan informasi terkait penemuan virus yang menjadi pandemi melalui aplikasi pesan singkat yang populer di China, yaitu *We Chat*. Kondisi yang terjadi di China telah menyebar ke seluruh dunia dan WHO pun akhirnya menetapkan dan

mendeklarasikan sebagai pandemi global. Penyebaran virus yang dikenal dengan nama Corona sendiri diketahui mulai memasuki Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 tepat 4 bulan setelah kemunculan pertamanya di China. Saat itu total kasus orang yang teridentifikasi terjangkit virus Corona sebanyak 2 orang. Presiden Indonesia mengatakan bahwa kedua orang yang identitasnya diketahui merupakan ibu dan anak tersebut punya riwayat menjalin kontak dengan orang Jepang yang telah terinfeksi yang memasuki wilayah Indonesia. Semenjak kasus tersebut jumlah orang yang terpapar virus Corona di Indonesia mengalami peningkatan hingga saat ini. Sampai saat ini WHO terus memantau perkembangan kasus Covid – 19 ini dan menerbitkan secara berkala informasi terkini mengenai penyakit ini dan berikut adalah tabel mengenai data perkembangan penyebaran pandemi Covid – 19 di dunia dan Indonesia pertanggal 1 September 2021:

Tabel 1. Data Penyebaran Pandemi Covid-19 di Dunia dan Indonesia per 1 September 2021

Kasus Covid - 19	Total Dunia (Jiwa)	Total Indonesia (Jiwa)
Positif	218.786.713	4.100.138
Meninggal	4.538.183	133.676
Sembuh	195.605.808	3.776.891

Untuk laporan mengenai perkembangan kasus Corona di provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor pertanggal 02 September 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Data Penyebaran Pandemi Covid-19 Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor

Kasus Covid - 19	Provinsi Papua (Jiwa)	Kabupaten Biak Numfor (Jiwa)
Positif	41.703	2.726
Meninggal	1.155	145
Sembuh	38.059	2.524

Menurut Juan Pablo Bohoslavsky, seorang ahli PBB dalam urusan hutang dan hak asasi manusia (United Nations Independent Expert on Debt and Human Rights), menyatakan bahwa krisis kesehatan yang ditimbulkan virus Covid – 19 menggiring dunia ke dalam resesi ekonomi. Keadaan tersebut tentu saja menimbulkan ekonomi di seluruh dunia menanggung akibat dalam bentuk perlambatan ekonomi sebagai akibat dari Covid – 19. Akibatnya, kondisi negara Indonesia tentu saja mengalami penurunan pada pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2021 dilihat dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,97%. Namun, pada periode yang sama di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami tren positif menjadi sebesar 3,10%.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melakukan refocusing pada APBD 2021 dengan fokus utama untuk Refocusing kegiatan sebagai usaha dalam percepatan penanganan pandemi Covid – 19. Pada awalnya telah disepakati bahwa anggaran yang diterima oleh masing-masing OPD sebesar Rp. 300 miliar, namun dikurangi menjadi Rp. 20 miliar untuk setiap OPD.

Berdasarkan latar belakang di atas serta agar penelitian ini tidak bias dari tujuannya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana efektivitas refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid – 19 Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021. Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid – 19 Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melakukan refocusing pada APBD 2021 dengan fokus utama untuk Refocusing 7 kegiatan sebagai usaha dalam percepatan penanganan pandemi Covid – 19. Pada awalnya telah disepakati bahwa anggaran yang diterima oleh masing-masing OPD sebesar Rp. 300 miliar, namun dikurangi menjadi Rp. 20 miliar untuk setiap OPD. Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 316 ayat satu (1) bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dapat mengalami perubahan jika terjadi peralihan penganggaran atau terjadi keadaan luar biasa/darurat. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut: Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan; d. Keadaan darurat; dan/atau e. Keadaan luar biasa Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian magan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait efektivitas program – program yang sudah disusun pada refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid – 19 dengan judul “Efektivitas Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sebagai Upaya Percepatan Penanganan Pandemi Covid – 19 Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021.

1.3. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk memperkaya konsep – konsep dalam mengkaji penelitian ini. Beberapa penelitian yang penulis pilih untuk dijadikan acuan adalah Public Trust Buliding Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah : Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi COVID-19 oleh Deden Rafi Syafiq Rabbani. Volume 4 Nomor 1 Desember 2020. Dalam penelitian ini penulis memberikan solusi terhadap pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi Covid – 19. Perbedaannya terletak pada fokus pengelolaan keuangan yang menekankan agar mewujudkan public trust building strategy

Selain itu, penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan adalah Efektivitas Revisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 Dalam Upaya Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Wizerd Randa Tonapa. 2021. Dalam penelitian tersebut penulis memberikan informasi terkait revisi APBD yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan upaya percepatan penanganan pandemi Covid – 19 di Kabupaten Biak Numfor. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penulis lebih fokuskan kepada refocusing APBD untuk Tahun Anggaran 2021

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana lokus dan cara menganalisis penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan, yaitu penulis saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif dan berlokus pada BPKAD kabupaten Biak Numfor.

1.5. Tujuan

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud serta tujuan guna menjawab informasi terkait refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid – 19.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis Metode Penelitian Kualitatif. Kemudian pendekatan penelitian yang akan dipakai oleh peneliti dalam pelaksanaan magang nanti adalah pendekatan induktif. Penggunaan pendekatan induktif sendiri adalah pendekatan dari elemen yang lebih luas dan akan mengecil atau mengarah lebih spesifik, termasuk mencari cara penyelesaian dari suatu masalah yang kompleks dengan mengembangkan data atau teknik dalam pengumpulan data. Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menentukan informan atau narasumber yang terpercaya di bidangnya dalam penelitian ini berdasarkan operasional konsep yang telah peneliti buat. Informan diharapkan dapat memberikan informasi – informasi yang tepat terkait situasi dan kondisi dari latar belakang penelitian. Terkait hal tersebut, peneliti mewawancarai beberapa sumber informan yang akan peneliti jabarkan melalui tabel berikut :

Tabel 3. Data Informan Magang

No.	Informan	Jumlah (orang)
1.	Bupati Biak Numfor	1 (satu)
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	1 (satu)
3.	Kepala Bidang Anggaran	1 (satu)
4.	Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD	1 (satu)
5.	Kepala Sub Bidang Pengendalian APBD	1 (satu)
6.	Staf Bagian Penyusunan dan Pengendalian APBD	2 (dua)
7.	Kepala Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19	1 (satu)

Pengumpulan data yang hendak peneliti kumpulkan dan peroleh haruslah memiliki beberapa kriteria sumber data yang aktual, valid, jelas, terbaru, serta terpercaya. Tahapan pengumpulan data menurut Creswell (2016:253) yaitu “Kegiatan yang terdiri atas usaha pembatasan penelitian, pengumpulan informasi melalui kegiatan observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, pendokumentasian, pemberian bahan visual, serta usaha membuat protokol untuk perekaman/pencatatan segala bentuk informasi.”

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data menurut jenis – jenis Creswell yakni Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori Efektivitas menurut Sedarmayanti (2009:60), yaitu mengacu pada penilaian Sumber, Proses, dan Hasil

3.1. Pendekatan Sumber/Resource Approach

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 makin menurun dari yang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 berjumlah sekitar 48 Miliar, pada tahun 2019 turun menjadi 41 Miliar.

Menurut Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor Bapak Gunadi, S.Sos., M.Si. mengatakan sebagai berikut: “Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2019 mengalami sekali perubahan/revisi dimana pemakaian anggaran difokuskan pada belanja pegawai dan beberapa kegiatan festival di daerah dan akibat pemakaian yang besar Pemerintah Daerah sempat mendapatkan opini Disclaimer pada sitem keuangan daerah namun saat dilaksanakannya evaluasi dan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pendapatan asli daerah telah meningkat dari sekitar 41 Miliar menjadi sekitar 111 Miliar, walaupun Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang di berikan meningkat dari tahun 2018 sekitar 280 Miliar, pada tahun 2019 meningkat menjadi sekitar 300 Miliar namun penggunaan anggaran pada tahun 2019 ini masih cukup besar dan hanya fokus pada peningkatan sarana publik serta penganggaran-penganggaran program kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Biak Numfor yang intinya kami memulihkan keadaan keuangan kekurangan anggaran ditahun 2018 yang mengorbankan beberapa kegiatan OPD bahkan pemerintah serta perbaikan infrastruktur yang tertunda, pada tahun ini keadaan keuangan belum bisa dikatakan baik karena kami masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) memang masa sulit pemerintah dalam hal anggaran terjadi pada 2019 karena harus memulihkan keadaan keuangan yang disalahgunakan pada tahun 2018”.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2020 dikatakan bahwa pemerintah daerah mulai memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan hasil yang sangat meningkat sekitar 300% dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 namun karena adanya pandemi pemakaian anggaran dari PAD dengan cepat digunakan dikarenakan Dana Alokasi Umum yang langsung di geser pada penanggulangan COVID-19 serta pemberian Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang sangat turun dibanding tahun anggaran 2019 yang sekitar 300 Miliar kini hanya menerima sekitar 30 Miliar atau 10% dibandingkan tahun anggaran 2019.

Menurut Plt. Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor Bapak Gunadi, S.Sos., M.Si. mengatakan bahwa: “Kalau di APBD 2020 kami sudah sedikit legah karena pemulihan anggaran sudah kami rasakan pendapatan anggaran daerah juga kami terima lumayan besar baik dari PAD, DAU, DAK, bantuan sosial, dan hampir diseluruh bidang kami mendapatkan pendapatan anggaran yang meningkat tajam sampai sekitar 300%, hal ini dikarenakan saat BPK turun ke Biak kami dicek mengenai pemulihan anggaran serta proses penganggaran yang baik maka seluruh bantuan dari pusat dan provinsi meningkat dan mendukung adanya pemulihan penganggaran dibiak, PAD juga sangat membantu dimana wakil bupati Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd. yang telah dilantik menggantikan bupati yang bermasalah fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah dan itu berhasil dilakukannya, namun hal yang tak terduga terjadi dimana keadaan luar biasa atau

keadaan darurat terjadi yaitu COVID-19 dan mengharuskan kami merevisi APBD sebanyak III tahap dibulan mei, juli, dan november”.

Menurut Plt. Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor Bapak Gunadi, S.Sos., M.Si. beliau mengatakan terkait APBD 2021 sebagai berikut: “untuk penolakan secara langsung terkait dengan APBD yang difocusing tidak ada, namun hal tersebut tentu menjadi kendala kalau beberapa kegiatan tidak terlaksana dan menjadi tertunda karena dari APBD kami rasionalkan bahkan kita hilangkan. Kemudian kegiatan menjadi tidak maksimal, semacam kegiatan sosialisasi dan perjalanan dinas itu dilakukan refocusing kita kurangi dan dilakukan secara virtual, kemudian ada rehab-rehab gedung yang diprioritaskan karena refocusing kemudian kegiatan tersebut ditunda.”

3.2. Pendekatan Proses/Process Approach

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2021 adalah sekitar 1,26 Triliun yang dengan terjadinya keadaan darurat maka APBD 2021 ini di revisi dengan rincian belanja dan pemangkasan belanja adalah sebagai berikut: 1. Pemangkasan Pada Belanja Pegawai yang dari semula sekitar 402 Miliar menjadi sekitar 388 Miliar; b. Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat semula tidak ada menjadi sekitar 17 Miliar yang setelah penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris BPKAD Bantuan Sosial kepada kelompok Masyarakat ini merupakan bantuan dengan wujud pemberian modal usaha beternak dan budidaya yaitu antara lain Ayam Potong, Ayam Petelur, Ikan Lele, Ikan Nila, dll dengan memberikan modal usaha yang akan dikelola minimal 10 dan maksimal 15 orang; c. Uang honor bagi tenaga kesehatan non PNS naik dari sekitar 100 juta menjadi sekitar 2,5 Miliar Khusus untuk uang kerja lembur non PNS bidang kesehatan; d. Seluruh belanja OPD selain OPD yang terkait dengan kesehatan mengalami pemangkasan sebesar 20% dari sebelum revisi atau yang telah di rencanakan pada APBD 2021 yang belum di revisi; e. Seluruh kegiatan lapangan OPD dipangkas dari yang telah di tentukan sebelumnya pada APBD 2021 yang belum di revisi; f. Banyak belanja modal yang dipangkas secara drastis dan bahkan di hapuskan dari APBD 2021 sebelum revisi; g. Seluruh belanja pengadaan peralatan kantor dipangkas masing-masing sebesar 50% dari yang telah di tetapkan sebelumnya bahkan ada beberapa yang dihapuskan; h. Belanja beasiswa belajar S1 dan S2 di hapuskan dari sekitar 500 Juta menjadi 0; i. Seluruh belanja barang dan jasa mengalami pemangkasan kecuali belanja perlengkapan dan bahan kesehatan yang semula hanya sekitar 4 Miliar menjadi sekitar 20 Miliar, Belanja kelengkapan kerja tenaga kesehatan semua sekitar 23 Juta menjadi sekitar 50 Juta, Obat-obatan kesehatan dari sekitar 8 Miliar menjadi sekitar 12 Miliar; j. Pengadaan alat-alat kedokteran dan laboratorium naik dengan mengalami penambahan masing-masing sekitar 1.3 Miliar; k. Pembangunan dan perbaikan fasilitas jalan dan taman di potong habis dari yang telah di rencanakan sebelumnya pada APBD 2021 sebelum revisi.

3.3. Pendekatan Sasaran/Goals Approach

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masuk ke Kabupaten Biak Numfor pada bulan April 2020 yang diawali dengan hasil swab 6 orang dalam pemantauan yang dinyatakan positif dan langsung diisolasi di RSUD Biak. Semenjak pertama kali masuk ke Kabupaten Biak Numfor, kasus Covid-19 mengalami kenaikan dan penurunan yang menandakan bahwa pemerintah telah bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan langsung dari pusat, namun dari masyarakat sendiri banyak yang belum terlalu percaya dengan Covid-19 ini.

Menurut Bupati Biak Numfor mengatakan bahwa: “Trend kasus Covid saat ini sudah melandai, sejak bulan bulan september dengan data sebagai berikut :Bulan juli (diperiksa 1870, pos 1152, meninggal 60); Bulan Agustus (diperiksa 744, pos 150, meninggal 21); Bulan September (diperiksa 809, pos 18, peninggal 2); Bulan Oktober (periksa 709, pos 9, meninggal 2); Bulan November (periksa 609, pos 8, meninggal 2); Artinya trend kita sudah melandai, namun angka kematian kita masih tinggi, sehingga butuh kesiapsiagaan kita dengan memproteksi diri berupa vaksinasi dan prokes 3M. Sampai saat ini Kita baru menyuntikan pada 61.670 suntikan (40.95%), dengan sasaran kita sebanyak 75.296 org, sehingga pencapaian Herd Immunity 70 % harus segera disorong untuk mengantisipasi masuknya varian baru jenis B11529 (varian Omicron) yang berasal dari Gostwana tersebut. Kendala kami di tinggal Tracing dan Testig adalah terkait dengan kepatuhan pasien ketika kami tracing kontak erat dengan memberikan jawaban yang tidak jujur.”

Berikut tabel persentase pencapaian target pelaksanaan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua tahun anggaran 2021:

Tabel 4. Persentase Pencapaian Target

INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET	%
Pencegahan Pandemi Covid-19	100
Bantuan Sosial Tunai	100
Kebutuhan Sembako Masyarakat	100
Bantuan Modal Kelompok Usaha	90
Penanganan Pasien Covid-19	90
Pelaksanaan New Normal	100
Status Keuangan Daerah	90

Sumber: BPKAD Kabupaten Biak Numfor 2022

Pencegahan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor berjalan efektif dengan persentase pencapaian 100% karena berhasil melaksanakan lockdown dan menutup akses dari luar dan dalam Biak juga protokol kesehatan disemua tempat serta kinerja ASN dalam melaksanakan work from home berjalan baik dan lancar. Kebutuhan sembako masyarakat menjalankan program bupati dengan membeli sembako hasil produksi masyarakat kemudian disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu dapat dikatakan efektif dan mendapatkan persentase pencapaian target sebesar 100%. Bantuan Kelompok Usaha Masyarakat mendapatkan persentase pencapaian target sebesar 90% karena dari 20 kelompok yang telah diberikan modal usaha, 2 kelompok masyarakat mengalami usaha yang keduanya merupakan usaha ayam petelur. Penanganan Pasien COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor mendapatkan persentase pencapaian target sebesar 90% karena semua pasien ditangani dengan baik pemerintah berhasil menyembuhkan dan mengetahui dan penutup akses penyebarannya, walaupun ada beberapa pasien yang meninggal dunia namun sebagian besar memang karena penyakit komplikasi dan factor umur dari pasien tersebut maka penanganan pasien COVID-19 dikatakan telah efektif.

Pelaksanaan new normal mendapatkan persentase pencapaian sebesar 100% karena berhasil membuka semua pasar swalayan, usaha kecil menengah, sekolah, serta kantor-kantor dinas instansi SKPD dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan dinilai sudah efektif.

3.4. Hambatan BPKAD Dalam Merefocusing APBD Tahun Anggaran 2021

Hambatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam merefocusing APBD tahun anggaran 2021 yaitu Kebijakan Pemimpin Daerah yang selalu berubah-ubah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2021 difocusing dengan tujuan percepatan penanganan pandemi COVID-19 namun setelah penulis melaksanakan penelitian keadaan penggunaan anggaran tidak semulus yang direncanakan pada hasil refocusing APBD karena banyaknya situasi darurat yang mengharuskan kepala daerah mengambil keputusan mendadak untuk pemakaian anggaran baik seperti bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu secara darurat, bantuan modal kepada usaha masyarakat, juga pembangunan/perbaikan infrastruktur yang harusnya telah di potong untuk penanganan COVID-19 secara keadaan harus dikerjakan dan harus diselesaikan.

Menurut Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Biak Numfor Bapak Yohanes Ayer, S.IP., M.Si. mengatakan: “Kebijakan kepala daerah yang berubah-ubah ini tidak bisa kami hindari juga mengingat posisi beliau yang baru dilantik dan harus membersihkan seluruh pekerjaan yang gagal pada bupati sebelumnya maka keputusan yang beliau ambil selagi masih disetujui juga dari DPRD dan inspektorat maka kami terus focus melaksanakan dan tetap merefocusing APBD dengan memperhatikan realokasi anggaran yang kami geser”

Berikut beberapa kebijakan Bupati Biak Numfor yang dilaksanakan dimasa pandemi COVID-19: 1. Bantuan sosial pangan non tunai yang penganggarnya harus ditambah karena Kelurahan Sorido yang tidak mendapatkan bantuan; 2. Penyelesaian pembangunan 8 objek wisata pesisir karena proyek yang sudah berjalan 70% dan bila dibiarkan akan masuk dalam kategori proyek pembangunan yang gagal dan banyak yang harus dimulai dari awal jika dihentikan karena keadaan pesisir pantai yang terus mengalami pasang surut jadi harus dituntaskan; 3. Perbaikan infrastruktur yang tidak bisa dihindari karena keadaan yang sangat rusak; 4. Penganggaran darurat ini tidak menggunakan anggaran belanja tak terduga karena anggaran belanja tak terduga ini telah digunakan untuk penambahan unit ambulans sebanyak 18 unit untuk 18 puskesmas dan 2 unit untuk RSUD yang ada di Kabupaten Biak Numfor.

Karena penggunaan anggaran secara mendadak ini baik melalui keputusan Bupati tertulis dan kebijakan tidak tertulis maupun kasus pasien positif COVID-19 pada bulan oktober-november yang mengharuskan APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Biak Numfor harus di refocusing.

3.5. Upaya BPKAD Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Merefocusing APBD Tahun Anggaran 2021

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang dialami Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor saat merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan karena keadaan darurat/luar biasa dengan masuknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia pada bulan maret, berikut upaya-upaya yang di ambil oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor.

Plt. Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor Bapak Gunadi, S.Sos., M.Si mengatakan sebagai berikut: “Kita Mengurangi belanja pegawai, kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk di pindahkan ke bagian belanja sesuai dengan Kebijakan Kepala Daerah yang mendadak dan menambah belanja dibidang kesehatan untuk menangani kelonjakan

pasien positif COVID-19 Di Kabupaten Biak Numfor. Pergeseran anggaran difokuskan pada bidang kesehatan dan bantuan sosial untuk menghadapi krisis ekonomi masyarakat, penyebaran pandemi, dan penyembuhan pasien positif di Kabupaten Biak Numfor.”

3.6. Diskusi Temuan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa dalam merefocusing APBD pada masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Biak Numfor berhasil melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19 walaupun dengan keadaan keuangan yang pengelolaannya masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

IV. KESIMPULAN

Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 dilaksanakan karena terjadinya keadaan darurat/keadaan luar biasa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan maret tahun 2020 dan ini yang menjadi perhatian serius maka dilaksanakannya Refocusing APBD tahun anggaran 2021. Kabupaten Biak Numfor berhasil melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19 walaupun dengan keadaan keuangan yang pengelolaannya masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Berikut ini akan penulis jabarkan kesimpulan dari analisis fokus magang riset terapan pemerintahan, yaitu: 1. Hambatan yang dialami oleh BPKAD dalam merefocusing APBD tahun 2021 adalah kebijakan kepala daerah yang selalu berubah-ubah dengan kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat pemulihan infrastruktur yang dipaksakan dilaksanakan ditengah pandemi COVID-19 ini sedang mengalami kenaikan pasien positif sekitar 400 lebih pasien positif; 2. Upaya yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor hanya terus mengurangi beberapa sektor seperti belanja pegawai dan penghapusan beberapa program kegiatan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu dikarenakan dalam proses Penelitian waktu yang diberikan Lembaga hanya 2 minggu sedangkan permasalahan di BPKAD Kabupaten Biak Numfor yaitu dalam merefocusing APBD tahun 2021 adalah kebijakan kepala daerah yang selalu berubah-ubah dengan kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat pemulihan infrastruktur yang dipaksakan dilaksanakan ditengah pandemi COVID-19 ini sedang mengalami kenaikan pasien positif sekitar 400 lebih pasien positif

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyadari awalnya penemuan penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya pada lokasi serupa berkaitan dengan BPKAD Pemerintah Daerah Biak Numfor untuk menemukan hasil yang lebih mendalam agar penelitian ini bisa disempurnakan lebih baik kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu kepada seluruh masyarakat yang bersedia untuk meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bagong, Suyanto. Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Bungkaes, H.R., dkk., 2013. *Hubungan efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal "ACTA DIURNA", Edisi April 2013.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon. Inc.: Boston London.
- Creswell, J. W. 2017. *Research Design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran edisi 4 terjemahan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Gibson, James L. et al. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen, Edisi keenam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Masruri. 2014. *Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010)*. Governance and Public Policy, vol. 1 (1): 53-76.
- McDurry, Janice. 1999. *Collaborative Group Analysis of Data*. New Zealand: Otago Polytechnic Dunedin Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rabbani Syafiq Deden Rafi. 2020. *Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19*. Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020
- Rofai, A. 2006. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah*. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Simangunsong Fernandes. 2016. *Kapita Selekta Kepegawaian Indonesia*. Bandung: Buku Literatur IPDN.
- Steers, Richard.M. 1985. *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku (Alih Bahasa Magdalena)*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)

<https://www.worldometers.info/coronavirus/>

<https://covid19.who.int/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>

